

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu tugas utama dibentuknya suatu Negara adalah meningkatkan kesejahteraan warga Negara. Kesejahteraan dapat diwujudkan melalui pembangunan. Pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan namun juga perlu memperhatikan aspek lingkungan sehingga tidak terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran pemerintah sebagai pelayanan publik yang secara teoritik dikaji dalam administrasi publik. Administrasi pembangunan merupakan kajian teoritik tentang proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Jadi ranah kajiannya adalah pelayanan publik.

Pelayanan publik tidak terlepas dari setiap komponen pembangunan yang tertuang dalam bentuk kebijakan dalam pembangunan negara. Salah satunya adalah pembangunan sektor pertanian. Tidak dapat dipungkiri bahwa, Indonesia merupakan negara yang warganya bergerak pada bidang pertanian. pembangunan sektor pertanian merupakan keberlanjutan dari adanya pelayanan publik. Sejalan dengan administrasi pembangunan, pembangunan sektor pertanian merupakan pembangunan kearah yang lebih baik dalam keadaan terencana dengan pengembangan usaha pembangunan sektor pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah yang sejatinya tertuang dalam bentuk program-program kerja. Seperti

dalam hal ini, pemberdayaan kelompok tani adalah memampukan dan memandirikan masyarakat dalam hal kesejahteraan.

Pemberdayaan kelompok tani merupakan upaya konkrit pemerintah maupun lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks pemberdayaan kelompok tani ini, pemerintah bertanggung jawab merencanakan dan mengimplementasikan langkah pemberdayaan mulai dari tingkat pusat hingga daerah dengan visi mensejahterakan rakyat, yang sasarannya difokuskan pada perekonomian masyarakat.

Berdasarkan program pemberdayaan dikemas dalam wujud yang baik dan menarik dengan tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal. Kendati demikian tidak selamanya program – program pemberdayaan itu kemudian menghasilkan output maupun outcome seperti yang diharapkan. Realitas dilapangan menunjukkan bahwa ternyata sebagian program pemberdayaan masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berjalan secara efektif guna memerangi kemiskinan. Banyak program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah dan sudah dijalankan sejak dulu namun terbukti masih banyak problem kemiskinan dimasyarakat. Kemiskinan masih tetap menjadi persoalan sosial yang serius dan belum berhasil diatasi sepenuhnya dengan berbagai program dari pemerintah.

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam daftar jumlah rumah tangga miskin terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kenyataan itu sungguh memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Terjadinya sejumlah permasalahan mendasar seperti

pengangguran, kemiskinan, dan belum optimalnya potensi desa. Hal tersebut mencerminkan bahwa institusi – institusi publik belum sepenuhnya mampu mendeteksi dan mampu merumuskan kebijakan yang dapat mencegah permasalahan – permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satu desa yang menjadi fokus perhatian peneliti adalah Desa Weelibo, karena didesa ini terdapat banyak petani sawah yang miskin.

Oleh sebab itu diperlukan suatu upaya untuk memberdayakan petani sawah dalam meningkatkan produktifitas pertanian. Maka dalam penyelenggaraan pemerintah harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan intitusi-intitusi nasional. Di samping itu tetap mengejar akselerasi peningkatan ekonomi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat diketahui dari pendapatan yang relatif masih rendah dan bersifat musiman dikarenakan latar belakang pekerjaan masyarakat disektor pertanian (sawah), dalam mengelola lahan masyarakat masih menggunakan cara-cara yang sederhana, sehingga membuat masyarakat desa Weelibo tidak mampu mendongrak ekonomi keluarga dengan hasil pertanian yang ada, juga dapat dilihat yang terjadi di Desa Weelibo menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi masyarakat setempat adalah kurang adanya tindakan pro aktif dari Pemerintah baik dari Pemerintah Desa, Sehingga pada pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini tampak dalam pemberdayaan masyarakat petani padi padahal di desa ini merupakan komoditi utama petani yang layak ditingkatkan karena wilayah topografi sangat cocok dengan jenis tanaman padi.

Untuk itu pemberdayaan petani melalui kelompok tani merupakan salah satu metode pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk memungkinkan mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Lembaga kecil ini merupakan suatu bentuk organisasi kerjasama yang membuat masyarakat mampu mengembangkan respon yang sesuai dengan logika dan menjadi suatu wadah yang menyatu para petani secara horizontal maupun secara vertikal. Sebelum terbentuk kelompok tani masyarakat Desa Weelibo mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk dan obat-obatan yang sangat mahal sehingga hasil pertanian para petani sangat kurang. Maka dari itu pada tahun 2008 awalnya kelompok tani dibentuk di Desa Weelibo berjumlah 4 kelompok, yaitu: (Usaha Baru, Suka Maju, Lega Manis, Liku Horomale). Berkaitan dengan dibentuknya kelompok pertanian merupakan salah satu usaha lembaga pertanian untuk membentuk individu-individu yang handal dalam mengelola usaha tani, maka kelompok tani yang telah dibentuk harus dibekali dengan pengetahuan dasar melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi.

Berdasarkan observasi awal bahwa perkembangan dan perjalanan kelompok tani di Desa Weelibo belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaannya, masyarakat masih dihadapkan dengan berbagai masalah yang sulit seperti belum memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang pengelolaan sawah. Berkaitan dengan itu, dapat dilihat pada kelengkapan alat-alat pertanian antara lain seperti; tidak tersedianya sawah atau lahan pertanian untuk tes bibit, lumbung padi, alat pengering padi, alat rontok padi, kios saprodi(penyedia benih/bibit unggul, pupuk dan obat-obatan), traktor, alat penyemprot

hama dan sebagainya, serta pula akses permodalan usaha tani yang masih sangat minim dan infrastruktur-infrastruktur yang kurang mendukung sehingga memerlukan perbaikan seperti jalan, jaringan irigasi, dan alat transportasi, serta eksistensi kelembagaan petani yang sebagian masih sebatas formalitas. Adapun maksud dari eksistensi kelembagaan yang masih bersifat formalitas disini adalah keaktifan pertemuan-pertemuan dari kelompok tani yang ada.

fungsi penyuluh pertanian dalam pemberdayaan usaha kelompok tani sangat perlu mendapat perhatian sebagai salah satu program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama karna belum tampak adanya upaya pemerintah desa. Pemerintah desa belum begitu optimal dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat dengan baik. Pemberdayaan dalam meningkatkan masyarakat di desa weelibo kecamatan Lamboya kabupaten Sumba Barat, sangat penting untuk mendukung kondisi desa karena sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki mata pencarian sebagai petani sehingga memungkinkan dengan adanya upaya penyuluhan pertanian dapat membantu masyarakat dalam menanggulangi masalah yang dihadapi seperti hasil pertanian yang semakin berkurang.

Berangkat dari hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“fungsi Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Study Kasus Usaha Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Sawah Di Desa Weelibo Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi penyuluh pertanian terhadap pemberdayaan kelompok tani di desa weelibo kecamatan Lamboya kabupaten Sumba Barat?

Tujuan penelitian

Sesuai pada rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui fungsi penyuluh dalam pemberdayaan usaha kelompok tani di desa weelibo kecamatan Lamboya kabupaten Sumba Barat.

Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dalam rangka penulisan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana administrasi negara pada FISIP di Unwira Kupang;
2. Sebagai bahan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat desa melalui kelembagaan kelompok tani di desa weelibo kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat;
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai refrensi tambahan bagi mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara dan input bagi Almamater Unwira Kupang